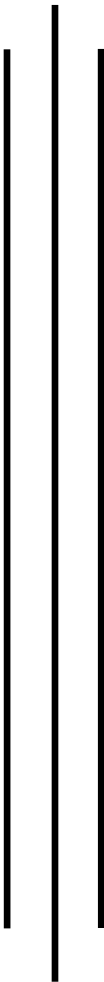


LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2027





RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2027



**RENCANA KERJA
TAHUN 2027
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM**



**Disusun Oleh
Sekretariat Daerah Kota Batam
Bagian Perencanaan dan Keuangan**

**PEMERINTAH KOTA BATAM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, 22 Juli 2026

Sekretaris Daerah Kota Batam



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1. Latar Belakang 6

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah..... 6

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah..... 6

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya 8

1.2. Dasar Hukum..... 8

1.3. Maksud dan Tujuan 10

1.4. Sistematika Penulisan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 13

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun
2025 13

2.2. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 14

2.3. Rumusan Permasalahan Dan Isu Strategis Tahun 2027 15

2.3.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 15

2.3.2 Permasalahan 31

2.3.3 Kondisi Lingkungan Dinamis..... 31

2.4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD 32

2.5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada
masyarakat..... 33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 35

3.2. Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat
Daerah..... 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38

4.1 Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027..... 38

4.2 Rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas
daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM
(bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan 55

BAB V 58

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 58

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 58

BAB VI PENUTUP..... 60

6.1. Catatan Penting..... 60

6.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 61

6.3. Rencana Tindak Lanjut 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU Tahun 2025 13

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025 13

Tabel 2. 3 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 15

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026..... 16

Tabel 2. 5 Tabel Pokok-Pokok Pikiran DPRD 33

Tabel 2. 6 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat..... 34

Tabel 3. 1 Target Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Batam....36

Tabel 3. 2 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027 37

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam..... 39

Tabel 4. 2 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Kota Batam terhadap Program Strategi Nasional (ProSN) 56

Tabel 4. 3 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 terhadap Prioritas Nasional Kota Batam..... 56

Tabel 4. 4 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 terhadap Program Prioritas Provinsi..... 57

Tabel 4. 5 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 terhadap Inflasi..... 57

Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027.....58

Tabel 5. 2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RKPD 7

Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan Renja 7

Gambar 1. 3 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya..... 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

The flowchart illustrates the process of drafting the initial RKP (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) and the subsequent stages of its development.

Penyusunan Draft Rancangan Awal RKPD

This stage involves the initial drafting of the RKP. It starts with the **Draft Ranwal RKPD**, which is then reviewed against the **Permasalahan Pembangunan Daerah** (Regional Development Problems), **Isu Strategis Daerah** (Strategic Issues), and **Program Prioritas** (Priority Programs). A **VERIFI-KASI** (Verification) step follows. If the draft is **sesuai** (suitable), it proceeds to the next stage. If **Tidak sesuai** (not suitable), a **List of problem** is identified, and the process loops back to the initial drafting.

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

The stages of RKP drafting are as follows:

- PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD** (Drafting of the Initial RKP Draft)
- Rancangan RKPD** (RKP Draft)
- Musrenbang RKPD** (Musrenbang RKP)
- Ranc. Akhir RKPD** (Final RKP Draft)
- Pergub RKPD** (Regional Regulation RKP)

The process includes several verification and adjustment steps:

- SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renja-SKPD** (Review of the Drafting of the Renja-SKPD Draft) is conducted after the initial drafting.
- VERIFI-KASI** (Verification) is performed on the **Rancangan RKPD**. If **sesuai** (suitable), it proceeds to the next stage. If **Tidak sesuai** (not suitable), a **Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD** (Adjustment of the Renja-SKPD Draft) is required.
- Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja-SKPD** (Improvement of the Final Renja-SKPD Draft) is conducted after the adjustment.
- VERIFI-KASI** (Verification) is performed on the **Rancangan Akhir RENJA SKPD** (Final Renja-SKPD Draft). If **sesuai** (suitable), it proceeds to the next stage. If **Tdk sesuai** (not suitable), the process loops back to the improvement stage.
- Penetapan RENJA SKPD** (Approval of the Renja-SKPD)
- RENJA SKPD** (Renja-SKPD)

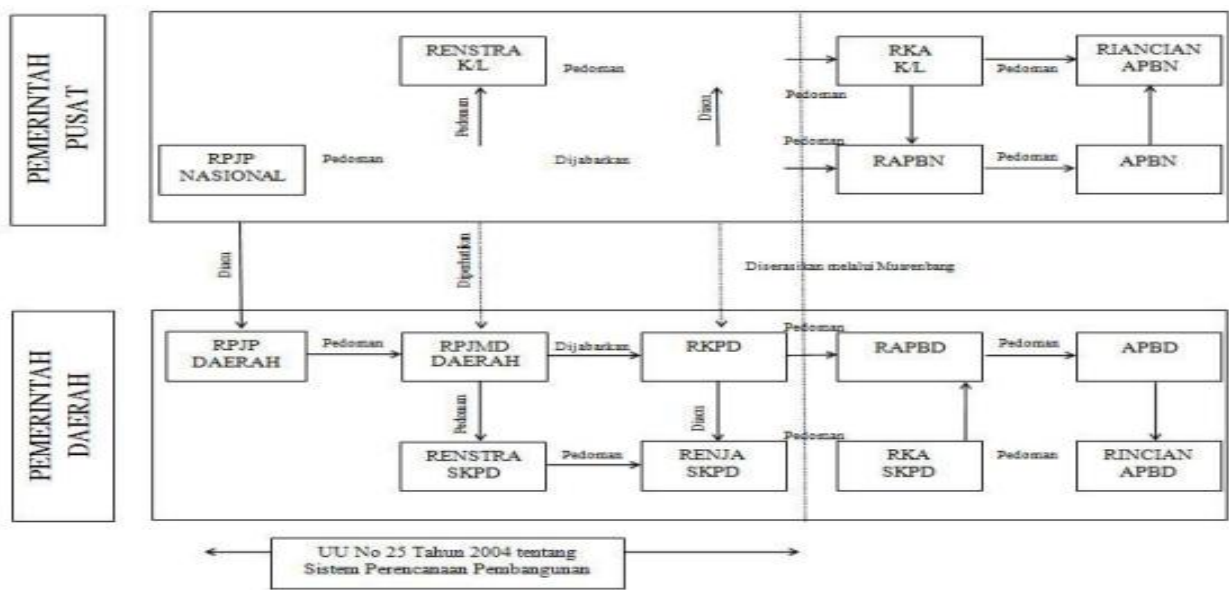
The flowchart also shows the integration of the **SKPD** (Strategic Action Plan) into the RKP process. The **SKPD** is developed based on the **Permasalahan & Isu layanan SKPD** (SKPD Service Problems and Issues), **Program & Kegiatan prioritas** (Priority Programs and Activities), and **Capaian Indikator SKPD 5 tahun terakhir** (SKPD 5-year Indicator Achievement). The **Rancangan Renja SKPD** (SKPD Renja Draft) is then developed and integrated into the RKP process.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1. 3 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Dasar hukum Sekretariat Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun (n) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025 -2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 53 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1623);
12. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1718).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun (n), dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2027

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).
3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian

target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja bidang urusan, pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah berjalan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan beberapa indikator masih memerlukan upaya peningkatan. Belum optimalnya capaian pada indikator tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, dinamika kondisi di lapangan, serta belum optimalnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1	Nilai LPPD	Status Kinerja	3.41	3.41	-	0%		3.47
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84.25	84.25	84.74	100.58%	ST	85.25

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	21	21	27.05	100%	ST	25
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	20.5	20.5	21.75	100%	ST	22.5

3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40	40	40	100%	ST	40
---	--------------------------	------	----	----	----	------	----	----

Terhadap indikator yang telah mencapai atau melampaui target, kondisi tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan program, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta komitmen seluruh pelaksana dalam mewujudkan sasaran pembangunan. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan tata kelola, dan inovasi dalam pelaksanaan program.

Sementara itu, terhadap indikator yang belum mencapai target, diperlukan langkah-langkah perbaikan melalui peningkatan kualitas perencanaan, penajaman sasaran program dan kegiatan, penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala agar kendala yang dihadapi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi capaian IKU dan IKK menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya sehingga target pembangunan bidang urusan dapat tercapai secara lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

2.2. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023–2025, Sekretariat Daerah Kota Batam tidak memiliki indikator maupun target capaian SPM. Hal ini disebabkan karena tugas dan fungsi Sekretariat Daerah lebih berfokus pada pelaksanaan fungsi koordinasi, pembinaan, fasilitasi, perumusan kebijakan, serta pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga bukan merupakan perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan SPM menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kota Batam tidak menetapkan target maupun melaporkan capaian indikator SPM dalam periode evaluasi Tahun 2023–2025.

Meskipun demikian, Sekretariat Daerah Kota Batam tetap berperan dalam mendukung pencapaian SPM melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi,

pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan pelayanan dasar oleh perangkat daerah teknis dapat berjalan secara efektif, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2. 3 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi		
			2023	2024	2025
		N I H I L			

2.3. Rumusan Permasalahan Dan Isu Strategis Tahun 2027

2.3.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Kota Batam tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	90.38		90.26	90.59	100%	90.29	90.29	99.9
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.21		72.46	70.59	97.4%	74.11	74.11	92.39
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Dan Evaluasi Yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan Dan Waktu Perencanaan,	100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%
4.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	2 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
4.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	1 Laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	75%	75%
4.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348 Orang/ Bulan		215 Orang/ Bulan	215 Orang/ Bulan	100%	308 Orang/ Bulan	308 Orang/ Bulan	100%
4.01.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%		100%	100%	100%	100%	78,5%	78,5%
4.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	350 Paket		NA	NA	NA	0 Paket	0 Paket	0%
4.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49 Orang		NA	NA	NA	14 Orang	11 Orang	0%
4.01.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	NA		14 Orang	14 Orang	100%	NA	11 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%		100%	100%	100%	100%	75%	75%
4.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	7 Paket	100%
4.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
4.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
4.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100%		100%	100%	100%	100%	46%	46%
4.01.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6 Unit		2 Unit	0 Unit	0%	8 Unit	0 Unit	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.07.0 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit		NA	NA	NA	1 Unit	7 Unit	100%
4.01.01.2.07.0 005	Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mabel yang Disediakan	115 Unit		245 Unit	377 Unit	100%	76 Unit	11 Unit	14,5%
4.01.01.2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Lainnya yang disediakan	90 Unit		160 Unit	160 Unit	100%	56 Unit	39 Unit	69,6%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan	100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%
4.01.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
4.01.01.2.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%		100%	100%	100%	100%	83,6%	83,6%
4.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%
4.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127 Unit		120 Unit	120 Unit	100%	121 Unit	121 Unit	100%
4.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	859 Unit		NA	NA	NA	825 Unit	285 Unit	34,5%
4.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di Pelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%		100%	66%	66%	100%	66%	66%
4.01.01.2.11.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan		2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100%	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100%
4.01.01.2.11.0 003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang		8 Orang	0 Orang	0 %	8 Orang	0 Orang	0%
4.01.01.2.11.0 004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan		2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100%	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100%
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi sesuai ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.12.0 001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang di sediakan	7 Paket		8 Paket	8 Paket	100%	7 Paket	4 Paket	100%
4.01.01.2.12.0 002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	7 Paket		8 Paket	8 Paket	100%	7 Paket	4 Paket	100%
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi	48		46	46	46	46.5	46	40%%
4.01.01.2.13.0 001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
4.01.01.2.13.0 002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	0 Laporan	0 %
4.01.01.2.13.0 003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.01.01.2.13.0 004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Tata Lakasana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	33%	33%
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	100%	50 Laporan	25 Laporan	50%
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	100%	36 Laporan	18 Laporan	50%
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	0 Laporan	0%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pencapaian SPM	96		94	97.10	100%	94.5	97.10	100%
		Persentase Cakupan Lembaga Keagamaan dan Tokoh Keagamaan yang diberikan Layanan Sesuai Kebutuhan	90.03		89.91%	89.91%	100%	89.94%	89.91%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Produk Hukum yang di Implementatif	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase MoU yang di tindaklanjuti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100%		100%	100%	100%	100%	55,3%	55,3%
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	0 Dokumen	0%
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	2 Dokumen	66,6%
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan Lembaga Keagamaan dan Tokoh Keagamaan yang diberikan Layanan Sesuai Kebutuhan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.02.2.02.000 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	24 Dokumen		24 Dokumen	40 Dokumen	100%	24 Dokumen	2 Dokumen	8,3%
4.01.02.2.02.000 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	200 Dokumen		200 Dokumen	250 Dokumen	100%	200 Dokumen	40 Dokumen	20%
4.01.02.2.02.000 3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	7 Dokumen	50%
4.01.02.2.02.000 4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	900 Keluarga		1440 Keluarga	898 Keluarga	99.78%	900 Keluarga	483 Keluarga	53.6%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang diharmonisasikan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.02.2.03.000 1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	410 Dokumen		410 Dokumen	515 Dokumen	100%	410 Dokumen	115 Dokumen	28%
4.01.02.2.03.000 2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus		8 Kasus	7 Kasus	87.5%	8 Kasus	8 Kasus	100%
4.01.02.2.03.000 3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi	410 Dokumen		410 Dokumen	515 Dokumen	100%	410 Dokumen	115 Dokumen	28%
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Negeri, Luar Negeri dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama yang di Capai	100%		100%	100%	100%	100%	24,4%	24,4%
4.01.02.2.04.000 1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	35 Dokumen		20 Dokumen	26 Dokumen	100%	30 Dokumen	22 Dokumen	73,3%
4.01.02.2.04.000 2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
4.01.02.2.04.000 3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas	98%		95%	95%	100%	95%	95%	96.9
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	89		85	88.8	100%	86	88.8	99.7
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang di Sediakan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijkan Layanan Perekonomian Daerah yang di Tindaklanjuti	100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%
4.01.03.2.01.000 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4.01.03.2.01.000 2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang di keluarkan	98		96	96	100%	96.5	96	16,6%
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Dasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	0 Dokumen	0%
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	12 Laporan	0 Laporan	0%
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	1 Laporan	50%
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	89		85	85	85	86	85	95.5%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.2.03.000 1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen		150 Dokumen	162 Dokumen	100%	150 Dokumen	132 Dokumen	88%
4.01.03.2.03.000 2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	350 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	100%	280 Dokumen	83 Dokumen	29,6%
4.01.03.2.03.000 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang da Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang		450 Orang	450 Orang	100%	384 Orang	450 Orang	85,3%
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%		100%	100%	100%	100%	40%	40%
4.01.03.2.04.000 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustria, KUKM, Penanaman Modal, Tenga Kerja	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	2 Dokumen	40%
4.01.03.2.04.000 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo Perhubungan Statistik, Persandian	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	2 Dokumen	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.2.04.000 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	2 Dokumen	40%

2.3.2 Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum sepenuhnya berjalan secara optimal sehingga memerlukan upaya penguatan secara berkelanjutan.

Belum optimalnya koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan proses penyelarasan program dan kegiatan belum sepenuhnya efektif. Di samping itu, masih diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja yang didukung oleh data dan informasi yang terintegrasi sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan akuntabel.

Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik juga menuntut peningkatan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan data, serta penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Selain itu, sebagai daerah yang memiliki karakteristik khusus sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Sekretariat Daerah dituntut untuk mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka mendukung iklim investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, berbagai permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027

2.3.3 Kondisi Lingkungan Dinamis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Batam dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis yang berlangsung secara dinamis, baik pada tingkat global, nasional, maupun daerah. Perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi informasi, implementasi reformasi birokrasi, percepatan transformasi digital, serta meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel menjadi faktor yang memengaruhi penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah.

Di sisi lain, perkembangan pembangunan Kota Batam sebagai pusat investasi, perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata memerlukan dukungan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, responsif, dan kolaboratif. Kondisi tersebut menuntut peningkatan kualitas koordinasi antar Perangkat Daerah, penguatan integrasi data dan informasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan dan pelayanan pemerintahan. Dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kota Batam perlu terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029

2.4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD

Berdasarkan hasil telaah terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Batam, Sekretariat Daerah Kota Batam tidak memiliki usulan program maupun kegiatan yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah lebih berorientasi pada pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi koordinasi, fasilitasi, perumusan kebijakan, pembinaan administrasi, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada umumnya diarahkan kepada perangkat daerah teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diakomodasi dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, pada periode perencanaan ini tidak terdapat Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Batam.

Meskipun demikian, Sekretariat Daerah Kota Batam tetap mendukung proses pengintegrasian Pokok-Pokok Pikiran DPRD ke dalam dokumen perencanaan daerah melalui pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi kebijakan, serta fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. 5 Tabel Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	PENGUSUL	USULAN	URAIAN PEKERJAAN	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	OPD TUJUAN AKHIR
					N I H I L					

2.5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kota Batam terus mengembangkan berbagai inovasi berbasis digital yang memberikan kemudahan baik bagi perangkat daerah, ASN maupun masyarakat. Inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat akses informasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur.

Salah satu inovasi yang telah dikembangkan adalah e-Monev (Electronic Monitoring and Evaluation). Aplikasi ini digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah secara berkala pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV. Melalui e-Monev, proses pelaporan capaian kinerja, realisasi program dan kegiatan, serta identifikasi permasalahan dapat dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik. Keberadaan aplikasi ini memudahkan proses pemantauan kinerja perangkat daerah sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi secara tepat waktu dan menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan.

Selain itu, Sekretariat Daerah Kota Batam juga mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai media penyedia informasi dan dokumentasi produk hukum daerah. Melalui JDIH, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta produk hukum lainnya yang berlaku di Kota Batam. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum yang akurat, lengkap, dan selalu diperbarui, sehingga meningkatkan keterbukaan informasi publik, kepastian hukum, serta pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku.

Melalui pengembangan inovasi e-Monev dan JDIH, Sekretariat Daerah Kota Batam menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua inovasi

tersebut tidak hanya mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata berupa kemudahan akses informasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan transparansi kepada masyarakat.

Tabel 2. 6 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Inovasi	Jenis	Permasalahan	Manfaat	Outcome	Indikator yang Didukung
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sistem Informasi terintegrasi melalui website JDIH	Sistem Layanan Website JDIH	Akses Produk Hukum Belum Optimal	Mempermudah akses terhadap Produk Hukum meningkatkan transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan produk hukum	Terwujudnya layanan informasi hukum yang cepat, mudah di akses, akurat	Persentase Produk Hukum yang Diharmonisasikan dan sinkronisasikan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	eMonev Generasi 3.0	Digital	Sebelum hadirnya eMonev G3.0, pencatatan realisasi belanja oleh Perangkat Daerah dilakukan pada level kegiatan/subkegiatan menggunakan aplikasi Tepra (2008–2019). Aplikasi ini hanya mampu mencatat realisasi fisik dan keuangan (RFK) yang diinput oleh admin OPD setiap bulan. Namun, karena keterbatasan fitur dan penggunaan teknologi lama, aplikasi Tepra: -Tidak dapat mengikuti perkembangan kebutuhan	Melalui penerapan eMonev G3.0, Pemerintah Kota Batam memperoleh berbagai manfaat strategis, antara lain: - Meningkatkan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan belanja APBD - Mendokumentasikan seluruh aktivitas secara digital, aman, dan dapat diakses kapan saja untuk keperluan monitoring dan audit - Menyediakan informasi yang lengkap, terstruktur	Sejak Januari 2024, aplikasi eMonev G3.0 resmi diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Kota Batam, didukung dengan program bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan intensif kepada PPTK dan admin OPD. - Selama 7 bulan penerapan, progres penginputan data oleh pengguna menunjukkan hasil yang signifikan: - Informasi realisasi kegiatan mulai terhimpun	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang Dikeluarkan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029 serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sebagaimana diuraikan pada Bab II. Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029 sehingga target kinerja yang ditetapkan merupakan kelanjutan dari tahapan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja masih bersifat sementara karena pelaksanaan program dan kegiatan masih berlangsung sampai akhir tahun anggaran. Beberapa indikator telah menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan tahapan target Renstra, sedangkan beberapa indikator lainnya masih memerlukan optimalisasi agar target tahunan maupun target Renstra dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Perbedaan tingkat capaian tersebut dipengaruhi oleh tahapan pelaksanaan kegiatan, proses koordinasi lintas perangkat daerah, serta dinamika pelaksanaan program selama tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027 ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, proyeksi realisasi sampai akhir Tahun 2026, serta target yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029. Penetapan target Tahun 2027 diarahkan untuk mempertahankan indikator yang telah berada pada jalur pencapaian target serta mengoptimalkan indikator yang masih memerlukan peningkatan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kualitas penyusunan kebijakan, tata kelola pemerintahan, pelayanan administrasi pemerintahan, serta monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Tabel 3. 1 Target Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2027
I	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel, adaptif, kolaboratif, efektif dan efisien	Nilai LPPD	3.44
		Indeks Reformasi Birokrasi	84.75
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan hukum dan kesejahteraan rakyat yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh rakyat masyarakat	Indeks Reformasi Hukum	90.00
		Indeks Kualitas Kebijakan	84.00
2	Meningkatnya perekonomian dan pembangunan daerah kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	8%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kota Batam	85

3.2. Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah

Arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran tahun ketiga Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029 dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2027 serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Kota Batam Tahun 2027. Penyelarasan tersebut dilakukan agar pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Sekretariat Daerah mampu memberikan dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

Sejalan dengan arah kebijakan Renstra, fokus kebijakan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027 diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi tata kelola internal, penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pengembangan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Di samping itu, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Arah kebijakan tersebut selaras dengan tema pembangunan RKPD Kota Batam Tahun 2027, yaitu "Pemantapan Kemandirian Masyarakat dan Keadilan Pembangunan", yang dijabarkan melalui penguatan daya saing ekonomi berbasis investasi, industri dan pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui penyelarasan tersebut, Sekretariat Daerah diharapkan mampu menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, pembinaan, serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan secara optimal sehingga dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah Tahun 2027.

Tabel 3. 2 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Batam	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PP 1. Pengembangan potensi ekonomi maritim dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Penguatan tata kelola internal melalui efisiensi sumber daya dan optimalisasi pengambilan keputusan.
PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PP 3. Pengembangan sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi serta pelestarian budaya Melayu	P3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Penguatan tata kelola internal melalui efisiensi sumber daya dan optimalisasi pengambilan keputusan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027

Sekretariat Daerah Kota Batam pada perencanaan tahun 2027 merupakan tahun ke-3 dalam Renstra Tahun 2025 - 2029 Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Batam untuk Tahun 2027 melaksanakan 3 (Tiga) program, 19 (Sembilan Belas) kegiatan dengan 59 (Enam Puluh) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			286.160.108.861							282.809.088.079				
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			286.160.108.861							282.809.088.079				
					SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM			286.160.108.861							282.809.088.079				
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A	Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	90.38	9 0 . 3 2 Indeks	134.556.966.919							90.35	145.111.838.079	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
						Nilai SAKIP PD	80.21	75.21 Nilai								77.21		SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		1 0 0 % Persentase	323.113.000							100%	466.695.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	176.500.300	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	2	233.332.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	146.612.700	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	3	233.363.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		1 0 0 % Persentase	65.263.816.835							100%	63.760.707.079	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3 3 8 Orang/bulan	65.059.756.835	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	343	63.484.074.079	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	204.060.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	12	276.633.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		1 0 0 % Persentase	1.347.251.000							100%	819.232.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		330 Paket	698.139.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	340	312.873.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		39 Orang	649.112.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	44	506.359.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		1 0 0 % Persentase	15.060.923.940							100%	19.931.137.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi			Daerah	Target		Pagu Indikatif
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Paket	3.075.934.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	7	3.586.897.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket	5.822.121.540	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	7	9.342.975.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	727.527.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	3	758.794.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	5.435.341.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	12	6.242.471.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100 % Persentase	4.259.505.887							100%	6.551.450.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		4 Unit	0	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	5	2.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		6 Unit	730.948.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	2	751.450.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		85 Unit	888.748.694	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	100	1.050.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		70 Unit	2.639.809.193	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	80	2.250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100 % Persentase	11.591.595.988								100%	15.900.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
												Nasional	Provinsi			Daerah		
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	8.016.626.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		12	8.400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.117.526.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		12	800.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	2.457.442.888	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		12	6.700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 % Persentase	22.971.619.171							100%	25.381.747.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		9 Unit	385.620.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		9	381.747.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi			Daerah			
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		123 Unit	14.058.614.911	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	125	16.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		839 Unit	2.323.550.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	849	2.268.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	6.203.834.260	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	10	6.232.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menerima layanan Administrasi Keuangan		100 % Persentase	6.367.584.298								100%	6.410.870.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/Bulan	3.686.656.425	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	2	4.100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi			Daerah			
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		8 Orang	28.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	8	30.870.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/Bulan	2.652.927.873	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	2	2.280.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumah tanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi sesuai ketentuan		100 % Persentase	4.837.584.900								100%	4.245.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		7 Paket	2.750.113.300	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		WALI KOTA	7	2.725.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		7 Paket	2.087.471.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		WAKIL WALI KOTA	7	1.520.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi		47. Angka	1.002.667.500								47.5	1.015.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi			Daerah			
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2 Dokumen	304.392.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	2	275.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		3 Laporan	182.099.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	3	255.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	176.238.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	2	125.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Dokumen	287.295.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	1	275.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		1 Dokumen	52.642.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	1	85.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan		100 % Persentase	1.531.304.400							100%	630.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		50 Laporan	593.451.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	50	395.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		36 Laporan	911.208.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	36	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		2 Laporan	26.645.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	2	85.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pencapaian SPM Kota Batam (Dengan persatuan: Persentase)	96	95 Angka	148.582.925.906							95.5	134.282.250.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
						Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	90.03	89.97 Angka								90.00		SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
						Persentase Produk Hukum yang di Implementatif (dengan satuan: Persentase)	100%	100 % Persentase								100%		SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
						Persentase MoU yang ditindaklanjuti	100%	100 % persentase								100%		SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		100 Persentase	7.883.809.700							100	5.125.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		12 Dokumen Dokumen	539.305.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	12 Dokumen	585.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1 Dokumen Dokumen	103.086.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	1 Dokumen	965.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 Dokumen Dokumen	7.241.417.700	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	3 Dokumen	3.575.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan sesuai kebutuhan		100 Angka	132.128.562.800							100	124.845.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		24 Dokumen Dokumen	87.994.070.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	24 Dokumen	85.550.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional			Provinsi	Daerah			
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		2 0 0 Dokumen Dokumen	29.773.895.000	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Stunting	SEKRETARIAT DAERAH	200 Dokumen	27.100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		14 Dokumen Dokumen	13.360.597.800	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	14 Dokumen	11.200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	02	2.02	0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		900 Keluarga Keluarga	1.000.000.000	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	900 Keluarga	995.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk H u k u m yang diharmonisasikan dan sinkronisasikan		1 0 0 % Persentase	892.065.406								100%	740.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		4 1 0 Dokumen Dokumen	326.761.500	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta M e m p e r k u a t Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. P e n g u a t a n inklusi sosial u n t u k mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Stunting	SEKRETARIAT DAERAH	410 Dokumen	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		8 Kasus	543.070.006	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	8 Kasus	675.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		410 Dokumen	22.233.900	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	410 Dokumen	35.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase jumlah dokumen fasilitasi dalam negeri, luar negeri dan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang dicapai		100 Persentase	7.678.488.000								100	3.572.250.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		35 Dokumen	7.431.952.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	35	3.197.250.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		1 Dokumen	140.902.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	1 Dokumen	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		1 Laporan Laporan	105.634.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	175.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pemanfaatan Kebijakan Layanan Perekonomian (Dengan Satuan: Persentase)	100%	100 % Persentase	3.020.216.036							100%	3.415.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
						Persentase Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Prioritas	98	96 Persentase								97		SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
						Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.	89	87 Angka								88		SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
						Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang disediakan	100%	100 % Persentase								100%		SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian daerah yang ditindaklanjuti		100 % Persentase	1.241.645.900							100%	1.035.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		4 Dokumen Dokumen	67.440.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	4 Dokumen	145.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi			Daerah			
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		4 Laporan Laporan	844.517.300	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	4 Laporan	595.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		4 Dokumen Dokumen	130.308.100	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	4 Dokumen	95.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD		2 Dokumen	199.380.100	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	2	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan yang dikeluarkan		97 angka	399.828.100								97.5	730.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		1 Dokumen Dokumen	224.350.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	4 Dokumen	125.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional			Provinsi	Daerah			
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		12 Laporan Laporan	154.061.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	12 Laporan	105.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		2 Laporan Laporan	21.416.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	4 Laporan	500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses pelaksanaan pengadaann barang dan jasa		87 Angka	1.297.466.936							88	1.395.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		150 Dokumen Dokumen	529.290.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	150 Dokumen	400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		300 Dokumen Dokumen	549.999.936	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	330 Dokumen	850.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif			
												Nasional	Provinsi						Daerah	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		450 Orang Orang	218.177.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	450 Orang	145.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti		100 % Persentase	81.275.100								100%	255.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		5 Dokumen Dokumen	31.216.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	5 Dokumen	85.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		5 Dokumen Dokumen	24.912.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	5 Dokumen	70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		5 Dokumen Dokumen	25.147.100	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		SEKRETARIAT DAERAH	5 Dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM	
					TOTAL:					286.160.108.861							282.809.088.079			

4.2 Rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran tahunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029 dengan berpedoman pada RKPD Kota Batam Tahun 2027. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan diarahkan untuk mendukung pencapaian tema pembangunan Kota Batam Tahun 2027, yaitu **"Pemantapan Kemandirian Masyarakat dan Keadilan Pembangunan"**, melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf yang membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah berperan dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, optimalisasi pelayanan administrasi pemerintahan, serta penguatan sinergi antar Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan juga diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai kewenangan daerah, mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mendukung pelaksanaan program tematik pembangunan daerah.

Selain mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, Sekretariat Daerah Kota Batam juga berperan dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas Pemerintah Kota Batam Tahun 2027, antara lain pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Kota Batam melalui koordinasi dan fasilitasi kerja sama dengan perguruan tinggi,.

Program Beasiswa tersebut terdiri atas Beasiswa Prestasi, yang berkerjasama dengan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Diponegoro. Beasiswa Hinterland yang berkerjasama dengan Institut Treknologi Sepuluh November

dan Politeknik Negeri Batam dan Beasiswa Tidak Mampu berkerjasama dengan Politeknik Negeri Batam dan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Pengendalian inflasi daerah melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta penguatan akses keuangan daerah melalui dukungan terhadap program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Dukungan tersebut dilaksanakan melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi lintas perangkat daerah sehingga pelaksanaan program prioritas dapat berjalan secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027 selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, kelompok sasaran, lokasi, dan pagu indikatif sebagaimana tercantum pada tabel berikut sesuai dengan Lampiran Bab V RKPD Kota Batam Tahun 2027. Berikut Tabel Program Dukungan RKPD yang ada di Sekretariat Daerah, dan dirangkum di tabel berikut:

Tabel 4. 2 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Kota Batam terhadap Program Strategi Nasional (ProSN)

ProSN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikator	Unit SKPD Penanggung jawab
Kesehatan untuk Semua		Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2 Dokumen	176,238,500.00	Sekretariat Daerah

Tabel 4. 3 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 terhadap Prioritas Nasional Kota Batam

Prioritas Nasional	Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2027	Pagu 2027	Perangkat Daerah Pengampu
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.	11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Setda).	134,556,966,919.00	Sekretariat Daerah Kota Batam
	12. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	148,582,925,906.00	

Tabel 4. 4 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 terhadap Program Prioritas Provinsi

Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2027	Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2027	Pagu 2027	Perangkat Daerah Pengampu
Prioritas 3 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu	35. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	148,582,925,906.00	Sekretariat Daerah Kota Batam
	36. Program Perekonomian dan Pembangunan	2,795,865,536.00	

Tabel 4. 5 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 terhadap Inflasi

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Pagu	Urusan Pemerintahan Bidang	Perangkat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan				199,380,100.00	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			199,380,100.00		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	199,380,100.00		

BAB V

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Batam. Penetapan IKU Tahun 2027 mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027. IKU menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta sebagai dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027 adalah sebagai berikut

Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
1	Nilai LPPD	Status Kinerja	-	3.44
2	Indeks Reformaasi Birokrasi	Indeks	84.02	84,75

Target kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah selama Tahun 2027, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pengukuran capaian kinerja organisasi secara berkelanjutan. Dengan tercapainya indikator tersebut, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin meningkat melalui tata kelola yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai capaian pada aspek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Batam. Penetapan IKK Tahun 2027 mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029 dan digunakan sebagai dasar dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah.

Adapun Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	27.05	27.05
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	21.75	21.75
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40	40

Terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja Kunci yang targetnya ditingkatkan di tahun 2027. Peningkatan target tersebut di dasarkan pada hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa kedua realisasi tersebut melebihi target yang direncanakan di Rencana Strategi Tahun 2025-2029. Oleh karna itu, target tahun 2027 disesuaikan menjadi lebih tinggi sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Pencapaian target Indikator Kinerja Kunci diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, serta mendorong peningkatan profesionalisme Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

6.1. Catatan Penting

Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025 - 2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 – 2029

Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas 3 (Tiga) program, 19 (Sembilan Belas) kegiatan dengan 60 (Enam Puluh) Sub Kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2027, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2027.

6.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

6.3. Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek,

pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;

4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Batam, maka seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam dalam pelayanan.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD